

OTONOMI DAERAH, BKKBN DAN KELUARGA BERKUALITAS

Akhir Januari 2002 lalu para tokoh gerakan KB Nasional berkumpul di Jakarta untuk merancang pengembangan program KB dan kelanjutan program pemberdayaan keluarga untuk tahun 2002. Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, telah membuka pertemuan itu dengan memukul gong disertai lima petunjuknya yang jelas bahwa keberhasilan pemberdayaan keluarga dimasa lalu harus lebih ditingkatkan.

Penurunan pertumbuhan penduduk yang meyakinkan, yang diiringi dengan membudayanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dalam kebanyakan keluarga Indonesia, harus dilanjutkan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan.

Dalam mengenang Hari Kartini besuk pagi, ada baiknya seruan Ibu Presiden itu kita renung kembali, yaitu bagaimana membantu meningkatkan pemberdayaan keluarga-keluarga berkualitas sebagai bagian dari penanganan kependudukan yang komprehensif dengan titik sentral pemberdayaan ibu-ibu dan remaja putri. Konsentrasi pada sasaran Kartini-Kartini di setiap keluarga, atau ibu-ibu rumah tangga dan remaja putrinya, merupakan pilihan sasaran utama yang harus dikembangkan di masa depan, agar setiap keluarga mempunyai kekuatan penopang ganda yang ampuh. Keluarga dengan penopang ganda tersebut akan lebih tahan menghadapi persaingan global yang tidak mungkin dibendung lagi.

Untuk itu, Kartini-Kartini pada jaman baru ini harus mendapat bimbingan dan pemberdayaan yang memadai agar peningkatan kemampuan dan ketrampilannya tidak hanya berlangsung secara alamiah dan lamban. Pemberdayaan mereka harus dipacu dengan memperhatikan perkembangan yang berjalan di sekitar masyarakat sehingga setiap Kartini baru bisa mempunyai mutu yang tinggi untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan, baik di lingkungan keluarganya, masyarakatnya, maupun secara nasional dan global.

Kegagalan penanganan kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga, terutama kegagalan peningkatan kualitas ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak perempuan remaja dari keluarga kurang mampu, yang pada setiap keluarga jumlah anggotanya makin kecil, akan mempunyai akibat fatal. Mereka bisa tidak percaya lagi akan kemampuan sumber daya manusia berkualitas dan bisa kembali ke jaman yang mengagungkan otot dan jumlah anggota keluarga yang besar untuk mencapai cita-citanya. Karena itu proses peningkatan kualitas penduduk harus dipacu, dan dimulai secara dini dengan memberikan perhatian khusus kepada Kartini-Kartini kecil. Mereka tidak boleh dinomor duakan oleh orang tuanya dalam pemeliharaan kesehatan, pendidikan dini, pendidikan dasar, dan harus mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi sesuai pilihan cita-citanya dan sesuai kemampuannya.

Apabila hal ini dikerjakan dengan baik, niscaya kita sudah mengajarkan demokrasi dan tanggung jawab kepada anak-anak secara dini. Pilihan oleh anak-anak secara pribadi itu

sekaligus meletakkan tanggung jawab kepada generasi muda dengan penuh kesadaran sejak usia dini. Pilihan itu sekaligus merupakan latihan untuk menempatkan dan menghargai manusia secara ideal dalam konteks masa depan yang bakal penuh dengan tantangan dan persaingan yang berat.

Upaya itu sekaligus merupakan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang membanggakan dalam menghadapi derasnya arus informasi dan persaingan global yang maha dahsyat. Proses itu sekaligus mewaspadaikan kemungkinan tumbuhnya nilai-nilai baru yang mengecilkan peranan keluarga sebagai lembaga pertama dan utama untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemampuan para ibu yang tinggi akan menjadi filter yang rapat tetapi manusiawi dalam mengalirkan arus baru yang bermanfaat dalam alam global yang penuh tantangan dan mencegah arus baru yang tidak cocok dengan tata nilai budaya bangsa yang kita junjung tinggi.

Siapkan Lembaga dengan SDM yang Mampu

Proses pemberdayaan keluarga Indonesia, yang sebagian besar masih berada pada posisi kurang mampu, memerlukan waktu yang lama. Untuk itu, dalam rangka otonomi daerah yang marak dewasa ini, pemerintah daerah perlu segera menyiapkan diri dan mempunyai lembaga yang kuat dengan tenaga-tenaga profesional, mampu dan berpengalaman. Keputusan pemerintah pusat untuk menyerahkan tugas dan kewenangan aparat BKKBN daerah kepada Pemerintah Daerah tingkat II, kabupaten dan kota madya, merupakan kesempatan emas yang harus segera ditanggapi dan tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan apapun.

Setiap daerah harus menyambut keputusan itu dengan tangan terbuka dan segera mengambil langkah konkrit dengan tepat. Bagi pemerintah daerah keputusan itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melaksanakan UU nomor 10 tahun 92 yang dalam waktu sesingkat-singkatnya "menyulap" lembaga BKKBN daerah dengan petugas lapangannya yang handal menjadi dinas kependudukan dan pemberdayaan keluarga yang utuh dengan tugas melanjutkan pemberdayaan keluarga yang telah dimulai dengan berhasil secara massal di masa lalu. Namun, karena masyarakat di hampir setiap daerah telah lebih maju dan siap melanjutkan proses pengembangan di masa depan secara mandiri, maka proses pemberdayaan itu harus dilakukan dengan cara baru, yaitu dengan mengutamakan pembekalan bagi setiap keluarga dengan kekuatan dan ciri khusus yang ada di daerahnya.

Proses pemberdayaan dari atas yang merupakan pendekatan ideal yang bisa sangat berhasil di masa lalu adalah karena kondisi awal pada waktu itu sifatnya sangat umum dan rendah. Setelah ukuran dan ciri-ciri keluarga mencapai posisi yang kuat, pengembangan lebih lanjut harus sangat memperhatikan aspirasi luhur yang ada di setiap daerah. Karena itu tidak boleh lagi ada lembaga yang mengatur proses pemberdayaan keluarga itu secara seragam langsung dari pusat. Pemerintah daerah sebagai otoritas yang bertanggung jawab di daerah harus bisa menampung dan memberi dukungan terhadap berkembangnya secara demokratis aspirasi daerah sesuai dengan harkat dan martabat masing-masing individu yang bertanggung jawab dan mandiri. Pemerintah daerah dan

seluruh aparatnya akan sangat berperan sebagai fasilitator pengembangan keluarga berkualitas yang sejahtera. Dan dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa, setiap keluarga harus mampu membawakan ciri-ciri kedaerahan yang luhur, dijunjung tinggi, dan majemuk itu secara damai.

Dalam tahapan seperti ini, pemberdayaan harus dilengkapi dengan akar sosial budaya daerah yang kuat dan karenanya harus didukung oleh institusi atau lembaga daerah yang kuat pula. Karena itu, untuk pembentukan lembaga atau dinas kependudukan dan pemberdayaan keluarga di tingkat kabupaten atau kota madya, setiap pemerintah daerah tidak boleh mempertimbangkan untung rugi pengembangan kelembagaan itu hanya secara ekonomi. Lebih-lebih hanya dari segi apakah lembaga atau dinas itu "menghasilkan pendapatan daerah", atau justru menjadi "penyedot dana daerah". Dana yang dialokasikan pada usaha yang berhasil akan dikembalikan berupa keuntungan yang berlipat ganda karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan gagasan, prakarsa, produk-produk dan jasa yang tidak ada taranya di masa depan.

Karena itu, sementara pemerintah pusat menata diri dan mempertimbangkan kemampuan apa yang bisa disumbangkan kepada pemerintah daerah dalam menata upaya pemberdayaan keluarga, ada baiknya seluruh institusi dan tenaga petugas lapangan dari BKKBN yang ada di daerah segera diambil alih atau diserahkan kepada daerah. Makin cepat penyerasian itu dilakukan makin baik. Berbagai lembaga daerah yang ada bisa segera ditata dan program kerjanya dipadukan secara serasi untuk menghasilkan program pemberdayaan terpadu yang holistik sebagai masukan pendukung untuk pembangunan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan aparat tertata dan program holistik yang terpadu, setiap daerah dapat mengembangkan pembangunan dengan pendekatan baru yang berdimensi jamak. Dalam pendekatan itu setiap keluarga dan penduduk harus dijadikan titik sentral pembangunan yang komprehensif. Pemberdayaan SDM sebagai bagian dari pembangunan terpadu itu harus didukung dengan dana yang cukup. Pendekatan ini sesuai dengan seruan Presiden adalah untuk meningkatkan kualitas penduduk. Langkah ini sejalan dengan langkah Menko Kesra dan Departemen Pendidikan Nasional yang akan menggelar gerakan peningkatan mutu pendidikan pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2002 nanti. Langkah ini juga sesuai program Departemen Kesehatan yang menggelar pelayanan kesehatan terpadu di daerah.

Pendekatan Berbasis Masyarakat

Dengan dialihkannya BKKBN di daerah sebagai lembaga dinas di tingkat pemerintah daerah maka segera dapat disusun suatu program pembangunan yang falsafah dasar, rancangan dan pelaksanaannya didasarkan pada pendekatan berbasis keunggulan masyarakat dan budaya daerah. Dengan cara itu akan terwujud suatu manusia baru untuk masa depan yang kental dengan kekuatan nilai luhur budaya bangsa yang majemuk tetapi bersatu padu dalam negara kesatuan yang kuat.

Salah satu contoh pendekatan ini telah mulai dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melalui jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang sedang mengembangkan program Pendidikan yang berorientasi pada pembekalan kecakapan dan ketrampilan untuk hidup sejahtera, "Broad-Base Education (BBE)". Dengan pendekatan ini para siswa dibekali dengan pengetahuan untuk hidup sejahtera dan pembekalan siap kerja.

Karena kemiskinan, hanya sedikit saja anak-anak muda yang berkesempatan meneruskan pendidikan ke jenjang SMU dan SMK, apalagi ke Perguruan Tinggi. Padahal salah satu akibat awal keberhasilan gerakan KB di Indonesia adalah ledakan remaja yang merupakan rentetan dari ledakan bayi atau "baby boom" sebelumnya. Apabila tidak diciptakan kiat yang tepat, godaan terhadap remaja, khususnya remaja perempuan, akan mendorong orang tua kurang mampu mengawinkan anak mereka pada usia yang sangat muda. Karena itu pengetrapan sistem pendidikan dengan pendekatan BBE akan memungkinkan anak-anak perempuan membekali dirinya dengan ketrampilan agar setelah tamat bisa langsung mempraktekkan ilmu dan ketrampilannya untuk bekerja. Anak-anak perempuan akan menjadi Kartini baru yang profesional, bekerja, menikah dan melahirkan anak pada usia yang tepat.

Dengan pendekatan BBE dan Manajemen Berbasis Sekolah atau School-Base Management setiap sekolah bisa mengembangkan kurikulum yang cocok untuk sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dengan kurikulum dan pendidikan yang bermutu bisa diselamatkan anak-anak remaja itu. Mereka dapat mempelajari reproduksi remaja agar mampu menyiapkan diri dengan membentengi dirinya terhadap godaan global seperti pergaulan bebas, penyebaran penyakit menular karena hubungan kelamin dan penyebaran HIV/AIDS yang belum ada obatnya.

Anak-anak remaja putri bersama keluarganya, oleh para petugas KB yang selama ini sangat akrab dengan keluarganya itu, dapat diajak mengembangkan kemampuannya menjadi sumber daya yang unggul, serta mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara demokratis membangun ekonomi keluarganya. Selanjutnya petugas KB yang menyatu dengan petugas daerah lainnya dapat memberdayakan dan mengembangkan "Kartini-Kartini" yang ada di Desanya secara dinamis. Upaya ini sekaligus dilakukan dalam derap pembangunan daerah yang sangat menyentuh manusia dengan penghargaan yang luhur karena setiap individu memilih sendiri tujuan pembangunan diri dan masyarakatnya.

Dengan cara demikian, pemerintah daerah, yang strategi dan arah tujuan pembangunannya sedang diawasi secara ketat oleh masyarakat, dengan dukungan lembaga profesional yang secara penuh dikelolanya, bisa mengatur pemberdayaan Kartini-Kartini di daerahnya, membangun diri dan keluarganya menjadi keluarga sejahtera, dengan kiat-kiat yang canggih, tidak saja dalam bentuk motivasi medis, edukatif, atau kewirausahaan, tetapi juga mengajak seluruh masyarakat mengambil tanggung jawab dengan partisipasi yang tinggi.

Dalam keadaan masyarakat desa dan kota merenung dan menilai peranan pemerintah daerah dalam pembangunan, mereka akan dikejutkan karena suatu bentuk baru pemberdayaan Kartini-Kartini model baru yang ideal di Desanya telah melaju dengan

mulus melengkapi pembangunan keluarga sejahtera yang berkualitas. Ketika Pemerintah Pusat belum bisa menjanjikan apa-apa, pemerintah daerah telah bergerak cepat dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Akibatnya sungguh menakjubkan. Kecepatan pertumbuhan daerah akan berlipat ganda karena Kartini-Kartini baru akan menjadi mitra kerja yang handal dan trampil. Semoga.

AWAS LEDAKAN 'BOM' GENERASI MUDA

Hasil akhir Sensus Penduduk tahun 2000 baru saja diumumkan oleh pemerintah. Pengumuman itu menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 adalah 206,3 juta jiwa. Pengumuman itu sekaligus juga menjelaskan bahwa penduduk kita makin mendekati penduduk negara maju karena angka jumlah penduduk di daerah perkotaan telah naik menjadi sekitar 45 persen dan angka pertumbuhan penduduk rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah sekitar 1,49 persen.

Lebih lanjut daripada itu kalau angka pertumbuhan penduduk pada tahun 1980-1990 rata-rata masih mendekati angka 2 persen, maka dengan sendirinya angka rata-rata dibawah 1,5 persen itu mengisyaratkan adanya pertumbuhan penduduk di tahun 2000 sudah kurang dari itu, yaitu sekitar 1,2 sampai paling tinggi 1,3 persen. Ini hanya bisa terjadi kalau angka fertilitas di tahun 2000 sudah sangat rendah, yaitu TFR atau angka fertilitas total tidak lebih dari 2,4 – 2,5 anak. Bahkan mungkin sekali angka fertilitas total untuk propinsi yang KB-nya sangat berhasil seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, mungkin juga Jawa Tengah dan beberapa propinsi lain sudah sama atau lebih rendah dari angka 2,2 anak atau yang biasa disebut dibawah replacement level.

Diduga pula bahwa angka mortalitas masih relatif tinggi karena dari beberapa penelitian masih terlihat adanya Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan (AKI) masih relatif tinggi. Namun dengan usaha yang gigih dalam duapuluh tahun terakhir ini dapat pula diduga bahwa angka kematian AKI itu akan segera menurun, terutama di daerah-daerah yang kondisi KB-nya relatif maju dan kesadaran masyarakat akan bahaya hamil terlalu muda, terlalu sering atau sudah tua masih hamil juga menjadi lebih tinggi.

Awat Ledakan Penduduk yang Baru.

Kalau Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan (AKI) itu menurun hampir dapat dipastikan bahwa angka kematian secara menyeluruh akan menurun dengan lebih drastis. Kalau penurunan ini diikuti lebih lanjut dengan penurunan angka kematian bayi, yang selama duapuluh tahun terakhir ini telah turun lebih dari 60 persen, dan juga angka kematian anak, maka tidak mustahil angka pertumbuhan penduduk akan mengalami goncangan. Goncangan itu bisa berarti naik drastis bisa juga menurun dengan lebih deras lagi, yaitu kalau kemantapan ber-KB dapat lebih ditingkatkan.

Dalam rangka Hari Anak dan Remaja Nasional 23 Juli 2002 ini perlu kita ingatkan bahwa penurunan angka pertumbuhan penduduk itu hanya bisa dijamin kalau sebanyak-banyak generasi muda mengikuti Gerakan Reproduksi Sejahtera dengan baik. Kalau mereka lengah, ada kemungkinan bahwa angka pertumbuhan penduduk itu akan naik

dengan drastis dan mengakibatkan terjadinya baby boom yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan baby boom di masa yang lalu.

Ada beberapa alasan kenapa angka pertumbuhan penduduk bisa meledak kembali. Pertama, jumlah generasi muda sekarang ini relatif tinggi, yaitu sekitar 20 persen dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang jumlahnya adalah 206,3 juta jiwa tersebut. Jumlah ini tidak saja besar tetapi mempunyai tingkat kesuburan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jaman baby boom di tahun 1970 – 1980 yang lalu. Tingkat kesehatan dan kemampuannya untuk “menghasilkan anak” juga jauh lebih tinggi karena umumnya mereka dilahirkan pada jaman yang jauh lebih kondusif dibandingkan dengan jaman kelahiran orang tuanya dulu.

Kedua, anak-anak muda sekarang masih menikah relatif pada usia yang muda. Anak-anak usia SLTP dan SMU sekarang ini masih banyak yang tidak sekolah, sehingga karena desakan ekonomi, terutama untuk anak perempuan, terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya. Jumlah anak-anak usia Hanya sekitar 60 persen anak-anak usia SLTP sekarang ini sekolah dan hanya sekitar 30-40 persen anak-anak usia SMU sekarang ini yang sedang sekolah dan hanya kurang dari 12 persen anak-anak usia dewasa sedang berada di bangku kuliah di perguruan tinggi. Apabila anak-anak ini tidak sekolah, maka bagi keluarga kurang mampu, keluarga yang hidupnya pas-pasan, akan merasa aman kalau anak-anak tersebut segera menikah, artinya menikah pada usia muda menjadi salah satu resep yang paling ampuh dan mudah untuk “mengentaskan anak-anak dari penderitaan kemiskinan”.

Ketiga, anak-anak muda yang semestinya menggeluti modernisasi dengan mengenal lebih banyak masalah reproduksi sejahtera belum banyak bersentuhan dengan materi reproduksi sejahtera sehingga perkawinan dibawah usia 20 tahun atau perkawinan dari wanita-wanita pada usia sekitar 20 tahun masih sangat tinggi. Padahal diketahui bahwa anak-anak umumnya dilahirkan pada tahun pertama masa perkawinan. Dengan demikian umumnya pasangan muda Indonesia melahirkan pada usia ibu sekitar 20- 25 tahun dan karena itu sebuah keluarga masih dengan mudah melahirkan tiga sampai empat kali selama masa reproduksinya. Dengan jumlah generasi muda yang relatif besar maka jumlah kelahiran sampai empat orang bayi itu akan menimbulkan kegoncangan demografis yang sangat berbahaya dan mempengaruhi ledakan baby boom yang dahsyat.

Keempat, tingkat kematian anak dan tingkat kematian bayi makin kecil. Dengan demikian jumlah anak-anak yang dilahirkan dan tetap hidup pada usia lima tahun atau lebih oleh pasangan muda akan tinggi dan anak tetap hidup sehat sehingga jumlah anak-anak yang ditambahkan setiap tahunnya bukan lagi sekitar 3 juta bayi atau 4 juta bayi, tetapi mungkin saja bisa mencapai 5 sampai 6 juta bayi setiap tahunnya. Anak-anak ini akan tetap sehat dan hidup sejahtera bersama kedua orang tuanya karena keadaan kesehatan dan gizi yang bertambah baik. Jumlah bayi yang ditambahkan setiap tahun menjadi sekitar 1,5 sampai dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah bayi yang dilahirkan dan tetap hidup dibandingkan dengan masa antara tahun 1990-2000.

Kelima, ledakan ini akan menjadi resiko karena generasi muda tidak saja tidak mengenal dengan baik reproduksi keluarga tetapi mereka sedang tergoda oleh kehidupan modern yang sangat permisif ditambah dengan akibat gangguan globalisasi lain seperti merebaknya hidup bebas tanpa perkawinan biarpun ada ancaman penyakit HIV/AIDS, atau penyakit lainnya akibat pergaulan bebas itu. Kondisi negatip itu akan menghasilkan anak dengan perhitungan yang sangat tidak rasional.

Kewaspadaan Generasi Muda

Generasi muda memang tidak bisa berpangku tangan. Ledakan penduduk dimasa lalu banyak “tertolong” dengan ti ngkat kematian bayi dan tingkat kematian anak yang sangat tinggi, demikian pula masih adanya kematian ibu yang juga relatif sangat tinggi. Ledakan penduduk baru, kalau terjadi, tidak akan bisa ditolong dengan tingkat kematian bayi yang tinggi, dan tidak pula ditolong dengan tingkat kematian anak yang tinggi. Justru akan dipersulit dengan makin panjangnya usia harapan hidup dengan naiknya presentase dari penduduk yang berusia diatas enampuluh tahun.

Hampir bersamaan waktunya dengan kemungkinan ledakan bayi dari generasi muda yang baru itu, di Indonesia juga akan terjadi ledakan para orang tua. Kalau di masa lalu “penduduk yang berusia diatas 60 tahun” bisa dianggap sebagai “barang langka”, maka dapat dibayangkan bahwa di masa lima sampai sepuluh tahun yang akan datang ini mereka yang berusia enampuluh tahun sudah merupakan pemandangan biasa dan penduduk dengan usia enampuluh tahun itu bisa dengan mudah ditemui di hampir seluruh pojok pedesaan. Jumlah mereka akan merangkak dengan meyakinkan dari angka 5 persen menjadi 10 persen dan bahkan di beberapa propinsi akan naik menjadi 11 – 15 persen dari seluruh penduduk yang ada. Orang tua menjadi pemandangan biasa. Ledakan bayi sebagai penyulut baby boom akan dibarengi dengan sulutan “grand father and grand mother boom” alias ada boom yang bersumbu ganda. Padahal ledakan dari generasi muda yang semula berusia dibawah limabelas tahun juga belum seluruhnya berhenti. Praktis penduduk Indonesia akan mendapatkan serangan bom dari segala sektor umur.

Piramida yang Meruncing

Sebaliknya, apabila generasi muda, yang dalam beberapa hari ini akan memperingati Hari Remajanya pada tanggal 23 Juli 2002 sadar akan makna peranannya yang bermata ganda, mengatur dan memahami reproduksi sejahtera dan mengandalkan diri pada usaha untuk mengasah dan mengembangkan dirinya menjadi sumber daya yang handal, maka generasi muda tahun 2002 akan menjadi pelaku sejarah yang luar biasa peranannya. Generasi muda ini akan bisa memahami reproduksi sejahtera dan menjadi pelaku fertilitas yang teratur sehingga jumlah generasi anak-anak dibawah usia 15 tahun akan tetap kecil dan akhirnya menghasilkan piramida yang meruncing.

Anak-anak usia dibawah 15 tahun akan mengecil sebaliknya anak-anak remaja usia 15 – 24 tahun mungkin saja akan tetap dominan. Kalau mereka bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tersedia secara luas dengan pendekatan Broad Based Education (BBE) yang marak, maka mereka dapat memanfaatkan kekuatan sumber daya alam yang tersedia secara melimpah di sekitarnya. Kalau itu yang terjadi maka kualitas generasi muda akan bertambah baik dan mudah-mudahan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berlipat ganda.

Untuk mencegah anak-anak muda yang sekarang tidak ada di sekolah, baik sebagai anak jalanan, anak di jalan atau anak yang hidupnya sehari-hari di jalan karena tekanan ekonomi atau karena memang orang tuanya begitu miskin dan sejak lama sudah menggantungkan hidupnya di jalan-jalan, maka pemerintah dan masyarakat luas harus dengan berani mengarahkan pembangunan pada anak-anak muda tersebut.

Arahan kepada anak-anak muda itu dapat ditunjukkan kepada orang tua yang anaknya belum sekolah, tidak sekolah atau terkena tekanan tertentu sehingga tidak sempat mengenal sekolah. Orang tua itu harus diingatkan agar orang tuanya memberi izin kepada pemerintah atau lembaga sosial kemasyarakatan lain untuk ikut menangani anak-anak jalanan atau anak-anak di jalan itu. Tanpa ikut sertanya orang tua dan komitmen anak-anak sendiri maka penyelesaian anak-anak yang tidak atau belum sekolah itu mustahil dilaksanakan.

Disamping itu harus pula dikembangkan sekolah yang mendasarkan diri bukan lagi pada sekolahnya atau kemampuan daya tampungnya saja, tetapi lebih menilai keberhasilannya atas dasar kepadatan yang ada di kampung atau di lingkungan di mana sekolah itu berada. *Kalau anak-anak di suatu wilayah belum seluruhnya tertampung di sekolah, maka sekolah itu dinilai belum berhasil.* Tetapi kalau anak-anak di seluruh kampung itu sudah semuanya sekolah, maka sekolah itu dianggap berhasil mengentaskan anak-anak yang ada di sekolah yang bersangkutan. Sekolah dengan pendekatan semacam ini harus pula memihak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dengan berbagai alasan menganggap anaknya tidak perlu bersekolah lagi.

Dengan sekolah yang memihak semacam itu tentunya kurikulumnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kalau kurikulum itu tidak disesuaikan anak-anak dan orang tua yang kurang mampu akan enggan bersekolah atau tidak ada minat di masukkan ke sekolah semacam ini. Mereka akan menilai bahwa sekolah semacam ini tidak memberikan pemberdayaan yang diperlukan atau tidak membawa manfaat bagi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan.

Masyarakat harus waspada. Kalau terjadi ledakan baru keadaannya akan jauh lebih dahsyat dan sukar untuk direhabilitasi. Hanya dengan ketekunan tertentu ledakan dapat dicegah, itupun dengan partisipasi yang sangat kuat dengan berbagai komponen pembangunan secara ikhlas, berkesinambungan, holistik dan tidak terkotak-kotak. Semoga dengan cara demikian hari Anak-anak dan Remaja 23 Juli 2002 mendapat makna yang sesungguhnya untuk mencegah ledakan bayi dan orang tua yang baru serta meningkatkan mutu dari sumber daya manusia yang ada. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan-Ledakan-Gemu-2072002). (A1/B2/D1)

BERAPA JUTA LAGI ANAK-ANAK HARUS DIKORBANKAN ?

Minggu ini menurut rencana *80 Kepala Negara* serta wakil-wakil negara lain setingkat *Menteri* dari seluruh Dunia, yang sangat peduli terhadap nasib anak-anak di masa depan, sedianya akan menggelar pertemuan paling akbar dalam awal abad ini, yaitu *Sidang Khusus PBB tentang Anak*, di *New York*. Namun, *kurang dari satu minggu* dari pembukaan pertemuan yang dipersiapkan oleh para pemimpin dan ahli-ahli selama satu tahun itu dibuka, telah terjadi suatu tragedi serangan mendadak terhadap *World Trade Center (WTC)* di jantung kota *New York*. *Pertemuan* yang sangat *vital tersebut terpaksa ditunda*.

Karena peristiwa itu, anak-anak dunia yang selama ini telah kalang kabut menghadapi perang terhadap berbagai penyakit, kebodohan, ketidakpedulian, dan akhirnya kemiskinan yang tidak kunjung selesai, hari-hari ini dibayangi ketakutan menghadapi ancaman perang baru yang lebih dahsyat dan sangat mengerikan.

Selama ini, anak-anak dunia telah banyak mengalami, ikut serta dan menjadi korban berbagai perang atau konflik yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi gambaran kemungkinan perang baru sebagai akibat dihancurkannya gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat itu sungguh sangat mengerikan. Dengan kemajuan teknologi dan kemampuan industri persenjataan yang canggih, peperangan atau konflik bersenjata yang terbaru akhir-akhir ini telah memanfaatkan anak-anak dan remaja. Akibatnya, anak-anak tidak saja menjadi korban karena terkena peluru nyasar atau karena ledakan bom yang salah sasaran. Dengan tersedianya produk senjata ringan yang terdiri dari pistol, senapan ringan, sampai AK-47 yang relatif ringan dan makin canggih telah memungkinkan anak-anak dibawah usia 18 tahun menentengnya sebagai bawaan untuk bisa berperan sebagai prajurit di medan laga.

Dengan senjata ringan tersebut, yang jumlahnya lebih dari ½ milyar, atau sekitar 1 pucuk senjata untuk setiap 12 orang, dan beredar dengan luas di seluruh dunia, anak-anak dengan mudah dapat dipersenjatai. Anak-anak yang sedang tumbuh rupanya menyukai "lakon" yang penuh advorisme, atau petualangan seperti bintang sinetron, atau film-film advonturir, atau pemain dalam lakon jagoan lainnya, dan dengan senang hati siap menjadi prajurit dan mengikuti kegiatan yang penuh tantangan.

Menurut data *UNICEF*, tidak kurang dari *300.000 anak-anak* telah ikut serta dalam kegiatan perang sungguhan di beberapa negara Afrika. Di *Sierra Leon*, dalam suatu "perang anak-anak" yang mengerikan, tidak kurang dari separo gerilyawan yang ada berumur dibawah 18 tahun. Mereka ikut sebagai prajurit, agen-agen spionase, ikut bertempur di medan laga, dan tidak jarang ikut memberikan pelayanan seksual kepada para seniornya.

Di *Uganda* bagian Utara, tidak kurang dari **12.000 anak-anak** dibawah usia 18 tahun ikut serta dalam pasukan ‘Lord’s Resistant Army’ sejak tahun 1985. Merekapun ikut dilatih, dikirim ke medan laga, mengalami kehidupan yang penuh dengan hubungan seksual, terkena penyakit menular dan tidak jarang yang mengidap Virus HIV/AIDS yang mematikan. Di *Colombia*, Amerika Latin, tidak kurang dari **30 persen** anggota-anggota unit gerilya adalah anak-anak dan remaja yang berusia dibawah 18 tahun.

Dengan adanya ‘prajurit-prajurit anak-anak’ yang langsung dikirim ke medan laga tersebut dengan sendirinya tidak dapat dihindari kematian anak-anak pada usia yang sangat muda. Disamping itu pada hampir setiap perang, apakah itu perang yang besar dengan terlebih dulu diumumkan, atau sekedar adanya konflik sosial politik, atau konflik jenis lainnya, anak-anak dan Ibu rumah tangga adalah korban terbesarnya. Sejak tahun 1990 lebih dari 2 juta anak-anak telah meninggal dunia karena peperangan semacam itu. Disamping itu diperkirakan pula sekitar 6 juta anak-anak telah menderita cacat, dan sekitar 20 juta anak-anak terpaksa meninggalkan rumah dan lingkungan desanya mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Lembaga-lembaga internasional telah berusaha untuk mengembalikan anak-anak yang dipaksa atau terpaksa ikut dalam pertempuran semacam itu ke desanya atau kepada orang tuanya masing-masing. Baru-baru ini tidak kurang dari **227 anak-anak** berusia antara **10 – 18 tahun**, dengan bantuan lembaga internasional, telah dikembalikan ke masyarakat di *Kigali* di dekat *Ibukota Rwanda* setelah selama musim panas yang lalu terpaksa ikut serta dalam kamp-kamp di daerah konflik yang berbahaya. Dengan bantuan *UNICEF*, baru-baru ini sekitar **3481 anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun** dikembalikan ke masyarakat di *Sudan Selatan* setelah selama **5 bulan** mereka mengikuti perang saudara yang mengerikan di *Sudan*.

Dari gambaran itu selalu dicatat apapun wujud perangnya, sejak jaman dahulu kala peperangan selalu membawa korban. Korban itu umumnya adalah anak-anak, ibu rumah tangga atau penduduk sipil yang tidak berdosa. Pada masa perang di tahun 1890-an korban penduduk sipil itu relatif masih rendah, yaitu hanya sekitar 5 persen saja. Pada periode Perang Dunia pertama korban dari kalangan sipil yang tidak berdosa itu sudah meningkat menjadi 15 persen. Pada Perang Dunia kedua korban penduduk sipil dan anak-anak itu sudah mencapai 65 persen. Tetapi peperangan yang nampaknya tidak terlalu dahsyat di tahun 1990-an, dengan menggunakan tank-tank besar, pesawat terbang jet dengan kemampuan pengeboman yang luar biasa, serta makin banyaknya senjata ringan yang dipergunakan dengan mudah oleh anak-anak dan remaja, korban penduduk sipil dan anak-anak yang jatuh telah naik menjadi sekitar 90 persen.

Dengan demikian, penggunaan anak-anak dan remaja, yang sebenarnya melanggar Artikel 21, 38, dan 39 dari ***"Konvensi tentang Hak-hak Anak"*** yang tidak memberi peluang untuk menempatkan anak-anak pada kegiatan yang berbahaya, yang teoritis memberikan hak kepada anak untuk berkumpul dengan keluarga, dan hak-hak anak lainnya, dalam praktek penggunaan anak-anak dan remaja sebagai prajurit tameng, prajurit pengintai yang menantang bahaya, atau prajurit penghibur seksual tetap saja menempati jumlah yang makin membesar.

Disamping perang, timbul pula kerusuhan antar suku, antar agama, antar etnik, atau antar kepentingan, yang “*relatip ringan*” yang selama beberapa tahun ini telah terjadi di beberapa negara. Indonesia tidak terkecuali dari musibah tersebut. Beberapa tahun terakhir ini beberapa daerah di Indonesia mengalami kejadian tersebut yang ternyata membawa akibat yang sangat mengerikan. Walaupun kita tidak tahu secara tepat berapa banyak yang telah terbunuh akibat konflik itu, tetapi yang jelas menurut catatan, di pada tahun 2000, di Indonesia terdapat tidak kurang dari **1,2 juta jiwa pengungsi tersebar di 19 provinsi**. Para pengungsi itu terdiri dari orang tua, para Ibu yang ditinggalkan suaminya, anak-anak yang tidak berorang tua lagi, anak-anak yang tidak mempunyai bapak lagi, atau anak-anak yang tidak mempunyai Ibu lagi. Menurut catatan jumlah mereka ada sekitar **350.000 anak-anak**. Anak-anak itu sebagian besar, atau sekitar **125.000** adalah anak-anak dari **Maluku**, **100.000** anak-anak dari **TimTim**, dan sekitar **75.000** anak-anak dari **Aceh**. Anak-anak itu sebagian besar terpaksa tidak sekolah dan hidup bersama orang tuanya, atau ibunya, atau saudaranya, atau di pengungsian sendirian tanpa kerabat dengan *penderitaan* yang sangat menyedihkan.

Prosentase anak-anak yang mengungsi di masing-masing daerah berbeda-beda. Di daerah yang penderitannya sangat tinggi, dimana banyak para Bapak atau para Ibu yang meninggal dunia meninggalkan anak-anaknya, prosentase jumlah anak-anak itu bisa mencapai **80 persen** dari seluruh pengungsi yang ada. Dalam kondisi seperti itu penderitaan anak-anak tersebut menjadi sangat berganda dan tidak pernah terbayangkan kapan persoalan yang rumit seperti ini dapat diselesaikan. Anak-anak itu tidak bisa membayangkan kapan bisa tumbuh kembang dengan suasana yang lebih harmonis.

Biarapun menurut ukuran dunia apa yang kita hadapi ini “*tingan*”, tetapi sampai hari ini kita belum bisa memecahkan persoalan yang rumit dan sangat mahal tersebut. Upaya untuk membuat Panti Asuhan akan memakan biaya yang mahal dan memerlukan tenaga pembimbing yang luar biasa banyaknya. Sementara itu upaya untuk membantu keluarga yang menderita dengan mengembalikan ketempat asal semula, nampaknya tidak semudah membalik tangan. Banyak keluarga yang mengalami trauma dan belum siap untuk kembali ke tempat asalnya semula.

Tidak banyak pilihan yang tersisa. Mereka berada dalam tempat pengungsian, baik dalam asrama atau ikut keluarga lain yang baik hati, dengan bekal yang sangat tipis, kalau ada atau kalau belum habis, akan selalu dalam keadaan yang menderita. Mereka, biarapun sebelumnya mungkin saja bukan keluarga pra sejahtera atau keluarga miskin, bisa-bisa akan menjadi keluarga yang sangat menderita. Kita semua, termasuk para pengungsi sendiri, harus mengambil tindakan yang konkrit dan cepat.

Kalau ancaman serangan balik yang sementara ini dicanangkan oleh Pemerintah Amerika betul-betul diwujudkan, bisa saja terjadi perang karena saling balas membalas yang membabi buta. Kalau peperangan itu merembet ketempat-tempat lain, bisa saja memicu Perang Dunia III yang dahsyat dengan korban yang akan sangat besar. Akibatnya, dunia akan dilanda berbagai krisis yang luar biasa. Krisis ekonomi dengan pangan yang makin langka akan menyebabkan Ibu-ibu dan anak-anak akan sangat menderita dan mengalami kekurangan gizi yang parah. Di Indonesia, selama sepuluh

tahun terakhir ini saja kita telah mendapat kesukaran untuk menurunkan tingkat kematian ibu karena mengandung dan melahirkan. Kalau terjadi perang dan kelangkaan pangan, maka angka kematian ibu yang sudah mulai berada dibawah angka 400 per 100.000 ibu-ibu yang melahirkan dengan mudah bisa mencuat lagi.

Tingkat kematian bayi dan anak-anak dibawah usia lima tahun, yang mulai dapat diturunkan menjadi sekitar 43 – 45 per 1000 pada tahun 2000 dengan mudah bisa menjadi duakali lipat. Angka kematian anak dibawah usia lima tahun yang telah dengan susah payah dapat diturunkan menjadi dibawah angka 60 per 1000 kelahiran dengan mudah dapat naik lagi tanpa komando.

Jumlah keluarga di negara-negara berkembang dan miskin yang selama ini dengan susah payah mengurangi jumlah anak-anaknya yang terpaksa bekerja di bawah umur, dengan mudah akan “*terpaksa mengijinkan anaknya*”, yang masih dibawah umur, untuk bekerja kembali membantu menghidupi seluruh isi keluarga yang ada. Para orang tua pasti akan merelakan anak-anaknya bekerja dibawah umur, biarpun dilarang undang-undang dan berbagai konvensi dunia.

Di Indonesia keadaan kita dalam hal ini belum juga dapat diatasi. Banyak anak-anak *terpaksa bekerja* biarpun usianya belum mencapai usia kerja, baru berusia 10-14 tahun. Jumlah anak-anak yang terpaksa bekerja dibawah umur itu pada tahun **1990** sekitar **2,3 juta anak**. Pada tahun **1997** sempat *menurun* menjadi **1,7 juta**. Tetapi karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, sejak tahun 1998 jumlah itu naik lagi dan pada tahun **2000 mendekati angka 2,1 juta anak**. Orang tua yang tidak mampu tidak bisa mencegah apalagi melarang kegiatan anak-anak itu.

Karena itu, marilah kita berpikir dengan kepala dingin. Marilah kita kembangkan pendekatan yang penuh kedamaian agar nasib anak-anak dan remaja yang selama ini sudah sangat menderita, tidak ditambah lagi dengan balas dendam emosional tanpa perhitungan, atau diselesaikan dengan peperangan yang belum tentu menyelesaikan masalah.

HADIAH HUT KEMERDEKAAN : NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Penghargaan terhadap hak azasi yang sangat berharga adalah diakuinya seorang manusia sebagai manusia sejak dia dilahirkan. Di negara-negara maju penghargaan itu diwujudkan antara lain dengan memberikan kepada yang bersangkutan *nomor induk* yang dicatat dalam *registrasi penduduk* pada kantor-kantor semacam catatan sipil di setiap negara.

Nomor induk itu menjadi *milik pribadi* dan *berlaku seumur hidup*. Hal seperti itu, biarpun nampaknya sederhana, belum ada atau belum merata di Indonesia. Akan sangat dikenang apabila dalam rangka *Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke 56* ini, *Presiden RI, Ibu Megawati Soekarno Putri*, berkenan memberikan pengakuan itu sebagai *hadiah ulang tahun kemerdekaan*.

Dimasa lalu upaya untuk memberikan pengakuan seperti ini selalu menghadapi kendala yang sangat besar, karena belum ada sistem yang dapat diterima semua pihak, atau karena tidak ada anggaran yang dapat mendukung upaya yang sangat penting itu. Sebenarnya telah ada UU yang memberi payung pengantar untuk mengembangkan usaha tersebut secara konstitusional. *UU nomor 10 tahun 1992* mendefinisikan bahwa setiap penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Hak dan kewajiban setiap penduduk itu meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas. Hak penduduk itu untuk masing-masing matra diuraikan secara terperinci dalam UU tersebut yang meliputi hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan diri dan kemampuannya.

Sebagai anggota masyarakat, hak penduduk meliputi hak mengembangkan kekayaan budaya, pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya. Sebagai warga negara, hak penduduk yang dijamin dalam UU meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya. Sebagai himpunan kuantitas penduduk dijamin haknya untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan nasional.

Lebih lanjut UU itu juga menjamin bahwa hak penduduk itu meliputi berbagai aspek tentang pengembangan kualitas diri sampai kepada hal-hal yang menyangkut pengembangan kekayaan budaya yang sangat luas. Disamping itu disebutkan juga bahwa setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak dengan jumlah yang ideal, atau mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Lebih dari itu setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya, dan agama. Karena itu, setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup.

Untuk pemantauan perkembangan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan itu maka setiap penduduk berkewajiban atas pencatatan setiap kelahiran, kematian, dan perpindahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya **GBHN 1993** menggariskan bahwa "*Administrasi, pencatatan dan statistik kependudukan terus disempurnakan sehingga menjadi sumber data yang dapat diandalkan untuk menunjang perencanaan pembangunan diberbagai bidang, sektor, wilayah, dan daerah, serta menunjang perkiraan dan sasaran berkala dari perkembangan kependudukan*". Lebih lanjut digariskan pula bahwa upaya tersebut perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai termasuk di daerah-daerah.

Selain itu, dalam Repelita VI diprogramkan pula arah penyempurnaan sistem informasi kependudukan yang meliputi "pengembangan administrasi, pencatatan dan statistik kependudukan melalui penataan registrasi penduduk, pengumpulan data kependudukan secara teratur dan berkala, seperti data sensus penduduk dan data antar sensus, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi secara luas agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk aparat pelaksana, serta pengguna data untuk mengetahui lebih lanjut pentingnya data yang dihasilkan oleh registrasi penduduk." Dengan bekerjasama antara **Badan Pusat Statistik (BPS)** dan **Departemen Dalam Negeri** telah pula dikembangkan uji coba modul Registrasi Penduduk tahun 1995 yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga pelaksana dan mulai nampak hasilnya yang cukup menggembirakan.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka sebagai kelanjutan pengaturan UU nomor 10 dan arahan GBHN tersebut, lebih lanjut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1994 yang menyatakan bahwa untuk mendukung pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk yang serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan hidup, dikembangkan sistem informasi perkembangan kependudukan dan keluarga. Sistem informasi itu diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan secara terkoordinasi antar lintas sektor yang terkait baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah.

Sistem informasi itu diharapkan menggariskan berbagai hal sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data;
2. Penyebaran dan penyajian;
3. Pengembangan jaringan sistem informasi;
4. Pengembangan sistem administrasi, pencatatan, dan statistik kependudukan dan keluarga termasuk registrasi penduduk.

Lebih lanjut daripada itu, untuk mengembangkan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh, selama ini telah disusun rancangan kebijaksanaan *Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)*, model komunikasi dalam rangka pengembangan jaringan sistem informasi lintas departemen dengan antara lain mempelajari berbagai sistem di negara maju maupun di beberapa negara berkembang. Dengan mempelajari sistem-sistem yang telah berkembang di negara lain, baik melalui literatur maupun dengan mengirim berbagai Tim ke Thailand, Malaysia, dan Republik Rakyat Cina (RRC), kita telah pula melakukan berbagai persiapan yang matang.

Dari hasil-hasil pengembangan itu, telah mulai dikembangkan *Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)* yang antara lain telah berhasil melakukan pendataan keluarga selama tujuh - delapan tahun terakhir ini dengan baik dan hasilnya makin bisa digunakan di seluruh tanah air. Dalam pengembangan SIDUGA tersebut, momentum *Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-56* sekarang ini dapat dipergunakan untuk lebih memacu lebih cepat lagi pengembangan sistem tersebut.

Pendataan Keluarga

Sampai hari ini kita merasakan bahwa Pendataan Keluarga yang telah dilakukan selama delapan tahun berturut-turut itu sesungguhnya merupakan kelanjutan dari Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Kesertaan KB yang telah membawa keberhasilan gerakan KB dengan gemilang. Pendataan PUS itu disempurnakan menjadi Pendataan Keluarga dengan arahan untuk mendapatkan data dasar tentang Kesertaan KB dan ciri-cirinya, Keadaan Keluarga Indonesia, dan Ciri-ciri Penduduk Indonesia.

Dalam pengalaman panjang penuh suka dan duka itu dapat dicatat bahwa Pendataan Keluarga pertama untuk sekitar 40 juta keluarga di Indonesia tahun 1994 diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat selama tiga bulan. Pada tahun-tahun selanjutnya pendataan itu makin sempurna. Masyarakat makin mengetahui kegunaannya dan makin membutuhkan data tersebut untuk membantu masyarakat, keluarga dan penduduk kita membangun dirinya secara mandiri.

Data yang makin baik itu menjadi pedoman awal dari upaya di berbagai bidang, antara lain bidang kesehatan untuk membagikan KARTU SEHAT kepada keluarga Pra-Sejahtera yang memungkinkan penduduk miskin atau pra-sejahtera mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas secara cuma-cuma. Jajaran pendidikan dengan seluruh aparat terkaitnya juga telah mempergunakan Peta Keluarga Sejahtera itu untuk memberantas buta aksara dan mengajak keluarga yang mempunyai anak dibawah usia limabelas tahun mengikuti Wajib Belajar Sembilan Tahun. Di berbagai daerah, para Gubernur dan Bupati telah banyak mempergunakan hasil pendataan itu untuk mengenal keluarga miskin di Desa Tertinggal sebagai indikator untuk membantu menyalurkan dana yang berasal dari Proyek IDT (Inpres Desa Tertinggal) atau proyek lain semacam itu. Dalam pembangunan keluarga sejahtera di Desa-desa tidak tertinggal dengan mempergunakan berbagai jenis sumber bantuan, Peta Keluarga Sejahtera itu mempermudah penyelesaian pembangunan keluarga tersebut.

Lebih lanjut dari pada itu, mulai banyak peserta kerjasama international yang ingin mempelajari SIDUGA tersebut, khususnya pendataan keluarga yang dilakukan di seluruh Indonesia untuk memonitor perkembangan KB maupun untuk mengembangkan pembangunan keluarga secara luas.

Dari beberapa negara ASEAN, diperoleh kesan bahwa sistem serupa belum dikembangkan secara terkoordinir, namun negara-negara itu umumnya telah mulai mengembangkan Sistem Identifikasi Penduduknya semenjak mereka dilahirkan. Sistem itu serupa dengan *Sistem Social Security Number* di *Negara-Negara maju*.

Atas dasar studi dan pengamatan tersebut, sebagai bagian awal dari *SIDUGA bisa saja* segera diperkenalkan suatu nomor induk kependudukan yang dapat diberlakukan semenjak seseorang dilahirkan dan berlaku seumur hidup. Identifikasi itu bisa disebut sebagai **NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN** atau disingkat **NIK**. Pengembangannya yang akan memakan waktu lama tidak perlu menjadi masalah, tetapi harus dianggap bahwa dengan *memulai suatu awalan* mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan yang memalukan selama ini.

Atas dasar studi dan pengamatan tersebut, sebagai bagian awal dari SIDUGA, bisa saja segera diperkenalkan suatu nomor kependudukan yang dapat diberlakukan semenjak seseorang dilahirkan dan berlaku untuk seumur hidup. Identifikasi itu bisa disebut sebagai **NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN** atau disingkat **NIK**

Nomor Induk Kependudukan atau **NIK** itu sekaligus dapat menjadi simbol dan pengakuan negara dan bangsa Indonesia terhadap keberadaan manusia Indonesia sejak dilahirkan. Seiring dengan pengakuan itu, berbagai Departemen, Instansi dan Lembaga Masyarakat kiranya dapat menyiapkan segala sesuatunya agar kiranya *Presiden RI, Ibu Megawati Soekarno Putri*, berkenan memberikan *Nomor Induk Kependudukan (NIK)* itu sebagai *hadiah ulang tahun kemerdekaan yang ke 56*, dan sekaligus menjadikan momentum **HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI KE-56** ini sebagai awal dari perbaikan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh dan terpadu. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*) – *NIK-2001*

BKKBN DAN MASALAH KEPENDUDUKAN

Setiap tanggal 29 Juni Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional. Setiap tanggal 11 Juli Indonesia juga ikut memperingati Hari Kependudukan Dunia. Dari berbagai upacara peringatan itu banyak rakyat Indonesia makin memahami makna kependudukan dan peranannya dalam pembangunan, termasuk peranan penduduk sebagai ujung tombak pembangunan yang berkelanjutan. Selama ini, bersama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja, BKKBN telah memberikan peran dan sumbangannya yang signifikan dalam membangun sumber daya manusia. Kalau masih ada yang menyangsikan peranan BKKBN khususnya, dan peranan penduduk dalam pembangunan, kita semua menjadi sedih dan harus bertanya apa makna berbagai upacara besar yang biasanya diadakan dalam berbagai hari kependudukan itu.

Penduduk Indonesia tahun 2000 yang semula diperkirakan akan mencapai sekitar 275 juta jiwa, ternyata dengan BKKBN dan bantuan jajaran pembangunan lainnya telah berhasil membantu keluarga Indonesia menghasilkan penduduk yang jumlahnya hanya sekitar 206 juta jiwa saja. Keberhasilan itu adalah karena tingkat fertilitas atau tingkat kelahiran yang biasanya setiap keluarga melahirkan sekitar 6 anak, telah berhasil diturunkan dengan lebih dari 50 persen, sehingga setiap keluarga hanya melahirkan kurang dari 3 orang anak. Dalam waktu yang bersamaan tingkat kematian bayi dan anak-anak juga turun drastis. Dengan jumlah anak yang jauh lebih sedikit dan lebih sehat para orang tua dapat memberi perhatian yang lebih tinggi dan lebih mampu untuk menyekolahkan anak-anak itu ke sekolah pilihannya.

Dengan program KB yang berhasil dan program wajib belajar 9 tahun yang sebagian besar telah berhasil, ternyata anak-anak usia sekolah dasar sekarang hampir seluruhnya telah dapat memasuki sekolah dasarnya. Dengan tekad

yang lebih gigih anak-anak itu melanjutkan ke sekolah menengah pertama untuk melengkapi keberhasilan wajib belajar 9 tahun tersebut. Gara-gara program KB yang berhasil, murid kelas I dan kelas II SD berkurang jumlahnya. Karena itu banyak sekolah dasar yang sekarang di konversi dengan membentuk afiliasi dengan SLTP setempat untuk menampung anak-anak tamatan SD dalam melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Ini berarti bahwa kerjasama antara bidang pendidikan dan bidang KB telah berhasil membuat anak-anak kita lebih pandai.

Namun demikian, penanganan persoalan penduduk di Indonesia belum selesai. Dewasa ini penduduk Indonesia justru sedang berada pada ambang yang lebih gawat dibandingkan dengan persoalan kependudukan yang kita hadapi dalam tahun 1960 atau 1970-an yang lalu. Pertambahan dan proporsi penduduk sedang mengarah kepada penduduk urban dengan kecepatan yang tinggi. Pertambahan penduduk urban itu bukan hanya karena adanya migrasi penduduk perdesaan ke kota, tetapi juga karena desa-desa bertambah maju dan penduduk desa tersebut, siap atau tidak, karena “desanya” berubah menjadi “kota”, dengan otomatis dan secara bersama-sama berubah menjadi “penduduk kota” atau “penduduk urban”.

Dinamika perkembangan penduduk desa menjadi penduduk kota yang terjadi dengan kecepatan tinggi itu bukan hanya monopoli bangsa Indonesia saja. Phenomena itu adalah suatu kejadian luar biasa dalam akhir abad ke-20 yang terjadi di banyak negara berkembang. Kejadian ini, dengan segala implikasi sosial, budaya dan politik yang cukup rumit, kurang mendapat perhatian para ahli, politisi dan penyelenggara negara. Untung saja perubahan itu terjadi seiring dengan makin turunnya angka fertilitas dan angka pertumbuhan penduduk secara menyeluruh. Kalau saja angka pertumbuhan penduduk tidak menurun secara drastis barangkali dalam waktu segera akan terjadi peledakan

penduduk yang lebih dahsyat dibandingkan keadaan peledakan yang terjadi pada tahun-tahun 1960 atau 1970 yang lalu.

Namun demikian, biarpun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia telah menurun, tahun ini penduduk Indonesia telah lebih dari **211 juta jiwa**. Kalau tren perkembangan penduduk Indonesia tetap dalam keadaan menurun memang Indonesia bakal bisa mencapai keadaan penduduk tumbuh seimbang, yaitu jumlah penduduk yang lahir sama dengan jumlah penduduk yang meninggal dunia. Tetapi kalau keadaan berbalik maka tidak mustahil penduduk Indonesia akan kembali bergolak dan menanjak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada beberapa alasan kenapa kita harus tetap waspada menghadapi pertumbuhan penduduk yang bisa meningkat dengan lebih drastis lagi.

Transisi Demografi

Semestinya ada dua pola transisi demografi yang terjadi dengan segala implikasinya. Transisi demografi model yang pertama terjadi dengan lamban yaitu di **negara-negara Eropa** seperti **Inggris** dan **Wales**. Transisi demografi model pertama yang berlangsung relatif lamban itu mulai sekitar **tahun 1700** sampai **sekitar tahun 1950-an**. Dalam proses transisi tersebut tingkat kematian turun dengan perlahan karena kemajuan industrialisasi yang terjadi di negara-negara tersebut. Adanya transisi itu menyebabkan nilai-nilai kultural tentang berbagai fenomena berubah secara perlahan.

Dalam masa transisi yang relatif lama itu masyarakat mempunyai waktu yang cukup lumayan untuk melakukan penyesuaian dengan perlahan, berubah dari masyarakat yang tradisional perdesaan perlahan-lahan menjadi masyarakat industrial perkotaan yang makin modern. Tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk bertambah baik dan lebih siap melakukan atau menerima berbagai perubahan dengan rasional. Kehidupan sosial politik penduduk juga mulai mengalami perubahan dengan mengembangkan kemampuan ekspresi politik yang makin terbuka dan vokal menuju masyarakat yang makin liberal demokratik.

Biarpun agak terlambat, negara-negara berkembang mengikuti juga proses transisi demografi tersebut. Anehnya, pada awal transisi, angka kematian pada **tahun 1900** relatif sangat tinggi dan baru mulai menurun pada sekitar tahun 1920-an. Angka itu menurun lebih tajam pada sekitar tahun 1940-1950. Proses penurunannya agak berbeda. Di negara-negara berkembang penurunan itu lebih banyak dipengaruhi oleh diketemukannya pengobatan modern dan munculnya lembaga-lembaga internasional dengan advokasi dan langkah-langkah nyata secara global. Namun demikian, untuk penyesuaiannya, tingkat kelahiran juga segera menurun, **tidak harus menunggu 150 tahun**. Tingkat kelahiran itu turun menyusul penurunan tingkat kematian dalam kurun waktu **kurang dari 50 tahun**.

Penurunan tingkat kematian terjadi di negara-negara dengan jumlah penduduk besar yang secara sungguh-sungguh melaksanakan program KB dan kesehatan dengan komitmen yang tinggi dan lebih meyakinkan. Dengan penurunan tingkat kelahiran atau

fertilitas dan tingkat kematian itu maka proses transisi demografi terjadi dengan cepat. Akibatnya tingkat pertumbuhan penduduk juga menurun dengan drastis.

Disamping kegembiraan karena adanya penurunan fertilitas dan tingkat pertumbuhan penduduk yang makin rendah, ada fenomena baru yang mengerikan, yang mungkin lebih dahsyat muncul di negara-negara berkembang. Fenomena itu adalah makin tingginya proporsi jumlah penduduk urban, ledakan remaja, angkatan kerja dan penduduk lanjut usia yang meningkat tajam dalam waktu yang pendek. Karena terjadi dalam tempo yang sangat singkat, implikasi perubahan fenomena ini pasti belum disadari secara mendalam oleh para pengambil keputusan dan politisi di negara-negara berkembang. Fenomena itu muncul dalam suasana kemiskinan dan tingkat kebodohan yang masih sangat tinggi. Tidak kurang dari *1,3 milyar jiwa* hidup dalam *kondisi sangat miskin* di negara-negara berkembang.

Karena keterbatasan anggaran fenomena yang muncul itu kemudian dicoba dibandingkan mana yang lebih dulu harus diselenggarakan. Kesimpulan semacam itu yang salah. Tidak ada yang didahulukan dengan mengorbankan salah satunya. Tidak ada upaya pendidikan yang harus mengorbankan upaya di bidang kesehatan. Tidak ada upaya di bidang kesehatan yang harus mengorbankan upaya di bidang keluarga berencana. Seluruhnya menempati posisi sentral dalam menanggapi upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu.

Dalam pola transisi demografi itu jelas sekali terjadi perubahan struktur piramida yang ada. Pola yang muncul di Indonesia dan negara-negara baru berkembang lainnya yang mulai berhasil dengan gerakan KB-nya adalah pola mirip dengan struktur piramida penduduk di negara maju. Pola ini menggambarkan adanya pengecilan jumlah dan proporsi penduduk yang berusia anak-anak tetapi diikuti dengan membengkaknya penduduk remaja dan penduduk lanjut usia.

Perubahan struktur itu menarik karena penduduk remaja yang sedang tumbuh itu adalah sesungguhnya hasil pendewasaan dari penduduk yang belum tersentuh dengan program KB pada jaman orang tua mereka masih remaja subur. Karena itu anak-anak yang sekarang dewasa dan menjadi orang tua muda adalah anak-anak pasangan remaja yang sangat rawan untuk kemungkinan menimbulkan bom bayi yang baru. Oleh karena itu pikiran-pikiran bahwa BKKBN sebaiknya dibubarkan adalah suatu gagasan yang sangat berbahaya.

Penduduk remaja yang sekarang ini sedang marak dan subur harus diikuti dan didampingi dengan program KB yang lebih lincah dibandingkan dengan program KB untuk pasangan yang lebih sederhana di masa lalu. Anak-anak muda baby boomers sekarang ini adalah anak-anak modern yang maju dan mandiri. Mereka harus didampingi dengan program KB oleh BKKBN atau lembaga semacam itu pada tingkat daerah otonomi yang kental. Komitmen untuk BKKBN tingkat Kabupaten dan Kota harus sangat tinggi agar supaya diperoleh sumber daya insani yang berkualitas karena dilahirkan oleh orang tua dengan jarak kelahiran yang wajar.

Penurunan fertilitas dan pertumbuhan yang mulai rendah harus dipelihara dengan baik karena kalau tidak demikian akan lebih sulit menggarap penurunan fertilitas di masa yang akan datang. Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan semacam itu diperlukan justru adanya komitmen yang lebih tinggi dari otoritas tingkat pusat agar proses penyelesaian di tingkat kabupaten dan kodya yang sedang memproses untuk mengambil alih BKKBN di masing-masing daerah menjadi lebih mantab, bukan dengan isue bahwa BKKBN anggarannya akan “disetorkan”-kan untuk anggaran pendidikan.

Ledakan Penduduk Urban dan Angkatan Muda

Dengan mengecilnya proporsi penduduk usia anak-anak, terjadi pembengkakan proporsi penduduk usia 25 tahun sampai 45 tahun, atau penduduk usia muda. Penduduk muda yang subur tersebut telah mendapat pendidikan dasar dan makin tidak tertarik untuk bertani seperti orang tuanya di desa. Penduduk muda itu mempunyai tendensi untuk pindah ke kota mencari pekerjaan yang bersifat “urban”, di pabrik atau industri jasa yang tidak banyak tergantung musim seperti bertani di sawah desanya.

Disamping itu penduduk yang tetap terdidik di desa mulai pula mempergunakan waktunya yang banyak untuk membangun industri dan perdagangan di desanya. Karena fasilitas transportasi yang makin baik, usaha itu makin bisa dihubungkan dengan rekan-rekannya dari kota sehingga menumbuhkan kepadatan dan ciri baru di desa-desa penyangga kota. Angkatan muda dan petani maju yang berhasil mulai ikut membangun industri dan jasa proses pasca panen di desa dan merubah infrastuktur desanya menjadi makin bersifat urban. Akibatnya pertumbuhan urban di negara-negara berkembang seperti Indonesia mempunyai dua sumber yang sama kuatnya, yaitu perpindahan penduduk ke kota dan berubahnya desa-desa agraris menjadi daerah urban yang baru, berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk urban di negara maju lain di masa lalu.

Dengan adanya keadaan seperti itu, maka jajaran BKKBN, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan pemerintah daerah harus makin peka terhadap fenomena kependudukan seperti itu. Karena itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, lembaga-lembaga tersebut diatas justru harus ditingkatkan peranan dan anggarannya, bukan malah dibubarkan !